

TUGAS PPKN

UUD 1945 Sebagai Konstitusi dan Hukum Tertinggi Indonesia



MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN PANCASILA
KELAS : XI-E1
TAHUN PELAJARAN : 2024-2025
NAMA KELOMPOK : Kelompok

1. Mutiara Aulia Prindani (21)
2. Naira Ivantz Dita Setyo Adi (22)
3. Nasya Nur Labibah (23)
4. Nawaal Irfan Bachmid (24)
5. Nayla Alifferralic Putri(25)

SMA HANG TUAH 2 SIDOARJO
Tahun Ajaran 2024-2025

KATA PENGANTAR

Assaamualaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas PPKN dengan baik serta tepat waktu. Terima kasih juga kami ucapkan kepada guru pembimbing yang selalu memberikan dukungan dan bimbingannya.

Sejak titik awal kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah menjadi fondasi yang kokoh dalam mengatur tata kelola negara dan kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai konstitusi tertinggi, UUD 1945 bukan hanya sekedar serangkaian pasal dan aturan hukum, melainkan sebuah manifesto nasional yang mencerminkan semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, keadilan, dan kemakmuran bersama.

Makalah ini bertujuan untuk menggali secara mendalam peran serta dan signifikansi UUD 1945 sebagai konstitusi dan hukum tertinggi Indonesia. Dengan memperhatikan beragam aspek, termasuk sejarah, filosofi, dan konteks sosial-politiknya, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang bagaimana UUD 1945 tidak hanya menetapkan struktur dan fungsi pemerintahan, tetapi juga menjadi pilar utama dalam menjaga kedaulatan, keadilan, dan persatuan bangsa.

Dalam perjalanan sejarahnya, UUD 1945 telah mengalami berbagai perubahan dan tantangan, mengikuti evolusi dan dinamika masyarakat dan negara. Namun, nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, seperti Pancasila sebagai dasar negara, kedaulatan rakyat, dan perlindungan hak asasi manusia, tetap menjadi inti yang tidak bisa ditawar-tawar. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang UUD 1945 menjadi sangat penting bagi semua warga negara Indonesia, terutama mereka yang terlibat dalam pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia.

Melalui analisis yang teliti dan pendekatan yang komprehensif, diharapkan makalah ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperkuat pemahaman tentang peran dan relevansi UUD 1945 dalam menjaga stabilitas, keadilan, dan kemajuan negara Indonesia. Selain itu, diharapkan pula makalah ini dapat memicu diskusi yang lebih luas dan mendalam tentang bagaimana UUD 1945 dapat terus menjadi panduan yang relevan dan dinamis dalam menghadapi tantangan-tantangan masa depan.

Surabaya, 2 Maret 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
PENDAHULUAN	4
1.1 Latar belakang	4
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan	4
BAB II.....	5
PEMBAHASAN	5
2.1 Pengertian UUD 1945	5
2.2 Supreme Law	5
2.3 Bentuk UUD 1945 sebagai Konstitusi dan Supreme Law	5
2.2.1 Pengertian Konstitusi	5
2.2.2 Konstitusi Republik Indonesia	5
2.2.3 Tujuan Konstitusi	6
2.2.4 Pelaksana Konstitusi	6
2.2.5 Ancama Konstitusi di Indonesia	7
2.2.6 Pencegahan Ancaman Konstitusi	8
BAB III	9
PENUTUP	9
3.1 Kesimpulan	9
3.2 Saran	9
DAFTAR PUSTAKA	10

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah menjadi landasan konstitusi dan hukum tertinggi yang mengatur negara dan masyarakat. Sebagai panduan utama bagi negara dalam menjalankan roda pemerintahan, UUD 1945 menjadi cerminan nilai-nilai dan cita-cita bangsa Indonesia. Selama bertahun-tahun, UUD 1945 telah mengalami perubahan dan penyesuaian sebagai respons terhadap dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang. Berbagai pasal telah direvisi, amandemen dilakukan, dan interpretasi atas nilai-nilai konstitusi terus diperbarui sesuai dengan kebutuhan zaman.

Perubahan zaman dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang peran serta UUD 1945 dalam menyelesaikan tantangan-tantangan baru yang muncul. Sejarah panjang UUD 1945 yang diwarnai oleh berbagai peristiwa penting, seperti reformasi politik, perubahan sosial, dan dinamika ekonomi, menunjukkan betapa pentingnya pemahaman yang mendalam tentang konstitusi dan hukum tertinggi Indonesia ini. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang komprehensif untuk menggali lebih dalam esensi dan relevansi UUD 1945 dalam konteks zaman sekarang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengertian dan peran UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia?
2. Apa yang dimaksud dengan konsep supreme law dalam konteks konstitusi?
3. Bagaimana bentuk UUD 1945 sebagai konstitusi dan supreme law di Indonesia?
4. Apa tujuan dari konstitusi Indonesia, terutama UUD 1945?
5. Bagaimana pelaksanaan konstitusi di Indonesia, khususnya dalam pembagian kekuasaan antara tiga cabang kekuasaan?
6. Apa saja ancaman terhadap konstitusi di Indonesia?
7. Bagaimana pemerintah dapat mencegah dan mengatasi ancaman-ancaman terhadap konstitusi?

1.3 Tujuan

1. Memahami peran UUD 1945 sebagai landasan hukum utama Indonesia.
2. Mengerti konsep supreme law dan penerapannya dalam UUD 1945.
3. Mengetahui tujuan konstitusi Indonesia, termasuk UUD 1945, seperti kedaulatan rakyat dan keadilan sosial.
4. Memahami bagaimana UUD 1945 dijalankan melalui pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan.
5. Mengidentifikasi ancaman terhadap UUD 1945, seperti pelanggaran HAM dan ketidakstabilan politik.
6. Mengetahui upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman terhadap UUD 1945, seperti penguatan sistem hukum dan pendidikan demokrasi.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian UUD 1945

UUD 1945 atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu konstitusi Indonesia yang menjadi hukum tertinggi negara Indonesia. UUD 1945 merupakan dasar bagi sistem pemerintahan dan perundang-undangan di Indonesia. Dokumen ini disusun dalam rangka sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tahun 1945 dan kemudian diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 telah mengalami beberapa kali amendemen, baik secara substansial maupun secara perubahan kecil, untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan negara. Meskipun demikian, prinsip-prinsip dasar dalam UUD 1945 tetap dianggap sebagai landasan utama bagi negara Indonesia.

2.2 Supreme Law

Supreme law merujuk pada hukum tertinggi dalam suatu yurisdiksi atau negara. Ini biasanya mencakup konstitusi negara atau dokumen hukum lainnya yang mendefinisikan struktur pemerintahan, hak-hak warga, dan batasan kekuasaan pemerintah. Supreme law memiliki kekuatan tertinggi di atas semua hukum lainnya dan tidak dapat diubah kecuali melalui proses khusus yang ditetapkan dalam konstitusi atau hukum yang relevan. Dalam banyak negara, konstitusi dianggap sebagai supreme law.

2.3 Bentuk UUD 1945 sebagai Konstitusi

2.2.1 Pengertian Konstitusi

Konstitusi adalah seperangkat prinsip-prinsip dasar atau aturan-aturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur tata cara pemerintahan suatu negara atau organisasi. Konstitusi menetapkan struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta batasan kekuasaan pemerintah. Secara umum, konstitusi bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan rakyat, serta untuk melindungi hak-hak dasar individu dari potensi penyalahgunaan kekuasaan pemerintah. Konstitusi dapat berbentuk tertulis atau tidak tertulis, tergantung pada sistem pemerintahan suatu negara.

2.2.2 Konstitusi Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah Konstitusi Republik Indonesia yang disahkan sehari setelah proklamasi kemerdekaan pada 18 Agustus 1945. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertinggi yang mengatur pembentukan, pembagian kekuasaan, serta hak dan kewajiban warga negara. Melalui serangkaian amendemen, UUD 1945 telah mengalami perubahan yang signifikan untuk memperkuat demokrasi, melindungi hak asasi manusia, dan menegaskan prinsip negara hukum. Konstitusi ini menetapkan prinsip kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan republik presidensial di Indonesia.

2.2.3 Tujuan Konstitusi

1. Menjamin kedaulatan rakyat: Konstitusi menetapkan bahwa kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dijalankan melalui pemilu yang demokratis.
2. Membentuk negara yang berdasarkan hukum: Konstitusi menegaskan pentingnya hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat dan menjaga keadilan bagi semua warga negara.
3. Menjamin hak asasi manusia: Konstitusi melindungi hak-hak dasar setiap individu, seperti hak atas kebebasan, hak atas perlindungan hukum, hak atas pendidikan, dan hak atas kesejahteraan.
4. Menjamin keseimbangan kekuasaan: Konstitusi membagi kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta menetapkan mekanisme pengawasan antara lembaga-lembaga tersebut.
5. Menciptakan keadilan sosial: Konstitusi menetapkan tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk dalam hal ekonomi, sosial, dan budaya.
6. Menjamin persatuan dan kesatuan: Konstitusi menegaskan pentingnya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa.

Tujuan-tujuan ini tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 dan prinsip-prinsip yang dijabarkan di dalamnya serta dalam pasal-pasal yang mengatur berbagai aspek kehidupan negara dan masyarakat.

2.2.4 Pelaksana Konstitusi

Di Indonesia, pelaksanaan konstitusi dibagi antara tiga cabang kekuasaan yang terpisah dan seimbang, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Berikut adalah penjelasan mengenai ketiga cabang kekuasaan tersebut:

1. Eksekutif: Cabang kekuasaan eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang, pengelolaan administrasi negara, dan pelaksanaan kebijakan publik. Presiden adalah kepala negara dan pemerintahan, serta merupakan simbol persatuan nasional. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum dan bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan pemerintah. Presiden juga memiliki kewenangan untuk mengangkat menteri-menteri yang membantu dalam menjalankan pemerintahan.
2. Legislatif: Cabang kekuasaan legislatif bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Di Indonesia, lembaga legislatif disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR merupakan lembaga yang mewakili kehendak rakyat dan bertugas untuk menyusun, mengesahkan, dan mengubah undang-undang. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat.
3. Yudikatif: Cabang kekuasaan yudikatif bertanggung jawab atas penegakan hukum dan pemberian keadilan. Lembaga yudikatif di Indonesia terdiri dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang bertugas menafsirkan UUD 1945 dan memutuskan sengketa kewenangan

antara lembaga negara, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi yang bertanggung jawab atas keputusan-keputusan hukum tingkat akhir, Dalam sistem konstitusi Indonesia, ketiga cabang kekuasaan ini saling mengawasi dan seimbang satu sama lain, mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan sehingga tercipta sistem pemerintahan yang demokratis dan stabil.

2.2.5 Ancama Konstitusi di Indonesia

Ancaman terhadap Konstitusi di Indonesia dapat berasal dari berbagai faktor dan situasi. Beberapa ancaman yang mungkin dihadapi oleh Konstitusi Indonesia antara lain:

1. Pelanggaran HAM: Ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip HAM yang dijamin oleh Konstitusi dapat mengancam integritas Konstitusi itu sendiri. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Konstitusi.
2. Ketidakstabilan Politik: Instabilitas politik, termasuk konflik antarpolitik, demonstrasi massa yang tidak terkendali, atau kegagalan lembaga-lembaga pemerintahan untuk berfungsi secara efektif, dapat membahayakan keberlangsungan implementasi Konstitusi.
3. Korupsi dan Kekuasaan Oligarki: Korupsi yang meluas dan dominasi oleh oligarki politik dapat mengakibatkan distorsi dalam proses politik dan pembuatan keputusan, yang pada gilirannya dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi Konstitusi.
4. Ekstremisme dan Separatisme: Gerakan ekstremis atau gerakan separatis yang menentang prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam Konstitusi, seperti persatuan nasional dan kebebasan beragama, dapat mengganggu stabilitas negara dan mengancam keberadaan Konstitusi.
5. Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi: Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang meluas dapat mengakibatkan ketegangan sosial dan politik yang dapat mengancam kedaulatan Konstitusi. Ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan dapat menyebabkan ketidakpuasan yang berpotensi melawan lembaga-lembaga pemerintahan.
6. Krisis Kesehatan dan Lingkungan: Krisis kesehatan, seperti pandemi global, atau krisis lingkungan, seperti bencana alam yang serius, dapat menimbulkan tekanan pada sistem politik dan ekonomi, yang pada gilirannya dapat mengarah pada pengabaian terhadap prinsip-prinsip Konstitusi.

Penting untuk diingat bahwa menjaga integritas Konstitusi adalah tanggung jawab bersama seluruh warga negara dan lembaga pemerintahan. Penguatan lembaga-lembaga demokratis, pemberantasan korupsi, penegakan hukum yang adil, serta pemberdayaan sosial dan ekonomi dapat membantu melindungi Konstitusi dari berbagai ancaman yang mungkin timbul.

2.2.6 Pencegahan Ancaman Konstitusi

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi Konstitusi dari berbagai ancaman yang mungkin muncul. Berikut adalah beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi ancaman terhadap Konstitusi:

1. **Penguatan Sistem Hukum** : Memperkuat sistem hukum dan menegakkan supremasi hukum adalah langkah krusial dalam menjaga Konstitusi. Pemerintah harus memastikan bahwa lembaga-lembaga penegakan hukum beroperasi secara independen dan efektif untuk menindak pelanggaran terhadap Konstitusi.
2. **Pendidikan Demokrasi** : Pendidikan demokrasi yang inklusif dan menyeluruh kepada masyarakat penting untuk memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi dan prinsip-prinsip Konstitusi. Ini dapat dilakukan melalui kurikulum pendidikan formal, kampanye pendidikan, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya.
3. **Penguatan Institusi Demokratis** : Membangun dan memperkuat lembaga-lembaga demokratis seperti parlemen, pengadilan, dan lembaga-lembaga independen lainnya adalah penting. Ini termasuk memberikan sumber daya yang memadai dan mendukung kerja lembaga-lembaga tersebut dalam menjalankan fungsi-fungsi mereka sesuai dengan Konstitusi.
4. **Partisipasi Masyarakat** : Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan dapat membantu menjaga akuntabilitas pemerintah terhadap Konstitusi. Ini bisa dilakukan melalui mekanisme partisipasi seperti pemilihan umum, dialog publik, dan konsultasi dengan pemangku kepentingan.
5. **Pencegahan Korupsi** : Korupsi sering kali menjadi ancaman serius bagi Konstitusi dengan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara dan melemahkan supremasi hukum. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah tegas untuk mencegah dan menghukum tindakan korupsi di semua tingkatan.
6. **Pengawasan Media yang Bebas** : Mendorong kebebasan media yang sehat dan independen merupakan elemen penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Media yang bebas dapat berfungsi sebagai pengawas yang efektif terhadap tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Konstitusi.
7. **Dialog dan Konsensus** : Mendorong dialog antarpartisai politik, kelompok masyarakat, dan lembaga-lembaga pemerintah dapat membantu menciptakan konsensus tentang prinsip-prinsip dasar Konstitusi dan meminimalkan konflik politik yang dapat mengancam stabilitas Konstitusi.
8. **Perlindungan Hak Asasi Manusia** : Menerapkan dan melindungi hak asasi manusia adalah prasyarat untuk menjaga keberadaan Konstitusi yang demokratis. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak-hak fundamental semua warga negara, tanpa diskriminasi.

Melalui langkah-langkah ini, pemerintah dapat berperan aktif dalam mencegah dan mengatasi ancaman terhadap Konstitusi, sehingga memastikan keberlangsungan demokrasi dan supremasi hukum di negara tersebut.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dalam upaya menjaga stabilitas, keadilan, dan kemajuan negara Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) memiliki peran yang sangat penting. Sebagai fondasi hukum tertinggi, UUD 1945 tidak hanya mengatur tata kelola negara, tetapi juga mencerminkan semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, keadilan, dan kemakmuran bersama.

Melalui pembahasan yang mendalam dalam makalah ini, kita dapat memahami betapa esensialnya pemahaman tentang UUD 1945 bagi semua warga negara Indonesia, terutama mereka yang terlibat dalam pembangunan dan penegakan hukum. Makalah ini juga menggarisbawahi betapa pentingnya menjaga integritas Konstitusi dari berbagai ancaman yang mungkin timbul, seperti pelanggaran HAM, ketidakstabilan politik, korupsi, dan ekstremisme.

3.2 Saran

Untuk memperkuat pemahaman dan implementasi UUD 1945, beberapa langkah kunci harus diambil. Pemerintah perlu memperkuat sistem hukum dan menegakkan supremasi hukum secara adil. Pendidikan demokrasi inklusif harus dipromosikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai demokrasi. Lebih lanjut, penguatan lembaga demokratis seperti parlemen dan pengadilan akan menjaga keseimbangan kekuasaan.

Masyarakat perlu didorong untuk berpartisipasi aktif dalam politik untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Pencegahan korupsi yang ketat dan kebebasan media yang sehat akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Dialog antarpolitik dan kelompok masyarakat penting untuk mencapai konsensus tentang prinsip-prinsip Konstitusi. Perlindungan hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat memastikan relevansi dan dinamisme Konstitusi dalam menghadapi tantangan masa depan, serta menjaga keberlangsungan demokrasi dan supremasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. <https://bobo.grid.id/read/083918481/apa-maksud-uud-nri-tahun-1945-sebagai-sumber-hukum-tertinggi-di-indonesia?page=all>
2. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776>
3. <https://an-nur.ac.id/blog/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945-sebagai-konstitusi-negara.html>
4. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-uud-1945-sebagai-isupreme-law-i-lt62386d81340e8>
5. <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/berita-terkini/sumber-hukum-tertinggi-di-indonesia-dan-sejarah-terciptanya-1yomQ20BNwj>
6. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8075>
7. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-konstitusi--tujuan--fungsi--dan-praktiknya-lt62a73bec64e6b/>